

BAB IV

PERBANDINGAN STRATEGI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP PERDAGANGAN BEBAS IJEPA DAN ACFTA

Dalam era perdagangan global saat ini, di bawah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam WTO dan perjanjian-perjanjian regional dan bilateral, negara-negara anggota WTO tidak bisa lagi memproteksi negaranya dari perdagangan internasional, sehingga suatu produk industri akan bisa masuk pasar global hanya ditentukan oleh daya saing produk itu sendiri. Untuk itu dalam era globalisasi ini, usaha untuk meningkatkan daya saing, baik daya saing sebagai negara agar menarik bagi para investor, maupun daya saing hasil produksi harus terus diupayakan untuk ditingkatkan. Meningkatkan daya tawar bagi para investor ataupun daya saing produk-produk di pasar Internasional, berkaitan erat dengan strategi yang digunakan dalam upaya merebut peluang di pasar internasional.

Demi capaian maksimal dalam upaya merebut peluang yang ditawarkan tersebut, sedikitnya ada 4 (empat) generalisasi yang dapat membantu seleksi suatu strategi. *Pertama*, struktur sistem internasional.¹¹⁸ *Kedua*, suatu strategi kebijakan politik luar negeri umum negara dapat dikaitkan dengan sifat, sikap dan kebutuhan sosial-ekonomi domestiknya. *Ketiga*, derajat pemahaman para pembuat

¹¹⁸ Sistem internasional dapat dirumuskan sebagai suatu himpunan kesatuan-kesatuan politik yang merdeka-suku bangsa, negara-kota, bangsa, atau kerajaan- yang cukup sering berinteraksi dan mengikuti proses yang teratur. Jadi karakteristik utama setiap sistem internasional dapat dipergunakan sebagai suatu perangkat variabel untuk membantu menjelaskan orientasi, tujuan, dan aksi-aksi yang khusus dari komponen unit sistem politik itu. Lihat K. J Holsti dalam "Politik

kebijakan terhadap ancaman luar yang berkesinambungan sehubungan dengan nilai dan kepentingan mereka sendiri akan sangat berkaitan dengan orientasi mereka terhadap lingkungan eksternal. Akhirnya letak geografis, karakteristik topografis, dan sumbangan suatu negara dalam sumber daya alam sering dapat dikaitkan dengan pilihan orientasinya.¹¹⁹

Agresifitas Indonesia dalam kerjasama ekonomi FTA (*Free Trade Area*) atau EPA (*Economic Partnership Agreement*) akan menjadi sangat berbahaya bila langkah-langkah liberalisasi ekonomi tersebut tidak didahului dengan penyusunan strategi pembangunan industri dan perdagangan yang jelas. Karena strategi inilah yang bisa menjadi pedoman bagi pengembangan industri nasional.¹²⁰ Untuk meminimalisir potensi bahaya tersebut, analisis SWOT Indonesia terhadap Jepang dan China yang dibahas pada bab III (tiga), menjadi tolak ukur bagi pemerintah Indonesia dalam menentukan strategi atau arah kebijakan politik luar negerinya, dan merebut peluang dari forum kerjasama IJEPA dan ACFTA. Dengan demikian, bab IV (empat) ini akan mendiskudikantentang Strategi Indonesia dalam kerjasama IJEPA dan Strategi Indonesia dalam forum ACFTA dalam skema perbandingan sebagai berikut :

¹¹⁹Holsti, K. J, *Politik Internasional :Kerangka Untuk Analisis*, Jilid I Edisi Keempat, (terj: M. Tahir Azhary), (Jakarta :Erlangga, 1998),. hlm. 109.

¹²⁰*Ibid.*,hlm. 2.

<i>IFAS</i>	<i>Stenghts (S)</i> 1. SDA Melimpah SDM Murah	<i>Weaknesses (W)</i> 1. Rendahnya Kualitas SDM	ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)	<i>IFAS</i>	<i>Stenghts (S)</i> 1. SDA Melimpah SDM Murah 2. Pasar Potensial Bagi Produk-produk China 3. Banyaknya UMKM 4. <i>Market Saturation</i> (jenuhnya pasar China)	<i>Weaknesses (W)</i> 1. Mutu SDM Rendah 2. Mutu UMKM Rendah 3. Mutu Barang Ekspor Rendah 4. Ekspor Komoditas Primer 5. Implementasi UU Investasi Rumit
<i>EFAS</i>	2. Pasar Potensial Bagi Produk-produk Jepang 3. Banyaknya UMKM	2. Rendahnya Kualitas UMKM 3. Rendahnya Kualitas Barang Ekspor 4. UU Investasi Berbelit		<i>EFAS</i>		
<i>Opportunities (O)</i> 1. Penurunan Tarif BM 2. Peningkatan Akses Pasar 3. Pembukaan Lapangan Pekerjaan 4. Terbukanya Transfer Teknologi 5. Peningkatan Investasi Jepang	Strategi (SO) 1. Meningkatkan Produktivitas UMKM 2. Meningkatkan Kapasitas Industri 3. Identifikasi dan Sertifikasi SDM 4. Penggunaan Teknologi Mutakhir Dalam Kegiatan Industri 5. Meningkatkan Volume Ekspor Ke Jepang	Strategi (WO) 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2. Mendukung Usaha UMKM yang Ada 3. Meningkatkan Kualitas SDM 4. Revitalisasi UU Investasi		<i>Opportunities (O)</i> 1. Penurunan Tarif BM 2. Terbukanya Akses Pasar 3. Pembukaan Lapangan Pekerjaan 4. Terbukanya Transfer Teknologi 5. Peningkatan Investasi China	Strategi (SO) 1. Meningkatkan Produktivitas UMKM 2. Memfasilitasi Pelaku Bisnis Rill (makro dan mikro) 3. Identifikasi dan Sertifikasi SDM 4. Menguatkan Struktur Industri 5. Memberikan Jaminan Usaha Bagi Para Investor	Strategi (WO) 1. Meningkatkan Kualitas Mutu SDM 2. Memberikan Insentif Fiskal 3. Meningkatkan Kualitas Produk 4. Mengubah Struktur Ekonomi 5. Revitalisasi Peran dan Fungsi Pemerintah Pusat-Daerah
<i>Treats (T)</i> 1. Hambatan Non-Tarif 2. Liberalisasi Barang dan Jasa 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Besarnya Investasi Jepang	Strategi (ST) 1. Meningkatkan Produktivitas UMKM 2. Sertifikasi Setiap Produk Impor (SNI) 3. Pengelolaan SDA dan SDM secara profesional 4. Pengembangan UMKM dengan Investasi Jepang	Strategi (WT) 1. Kerjasama Transfer Tenaga Ahli Jepang 2. Mempertahankan Stabilitas Keamanan Pasar 3. Kolaborasi Efektif Pemerintah Pusat dan Daerah		<i>Treats (T)</i> 1. Hambatan Non-Tarif 2. Liberalisasi Barang dan Jasa 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Derasnya Arus Investasi China	Strategi (ST) 1. Meningkatkan Produktivitas UMKM 2. Sertifikasi Setiap Produk Impor (SNI) 3. Meningkatkan Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Menguatkan Struktur Industri	Strategi (WT) 1. Kerjasama Transfer Tenaga Ahli Jepang 2. Meningkatkan Produktivitas UMKM 3. Ekspor Produk Turunan 4. Re-orientasi UU Investasi
Universal Strategi Indonesia Dalam Kerjasama JEPA			Keterangan : ★ Pengelolaan Daya Tawar dan Daya Saing ⊙ Kualitas Produk ⊕ Proteksi Produk	Universal Strategi Indonesia Dalam Kerjasama ACEFTA		
Strategi Ke dalam Meliputi : ★ Meningkatkan Daya Saing Pasar ⊙ Menguatkan Struktur Industri dalam Negeri ⊕ Pengamanan Perdagangan Barang		Strategi Keluar Meliputi : ★ Melakukan Kerjasama Alih Teknologi ⊙ Kerjasama Pengiriman Tenaga Ahli		Strategi Ke dalam Meliputi : ★ Menguatkan Pasar Domestik ⊙ Melakukan Pengamanan Produk dsalam Negeri ⊕ Mengubah Struktur Ekonomi		Strategi Keluar Meliputi : ★ Melakukan Kerjasama Alih Teknologi ⊙ Kerjasama Di dibidang Pertahanan

A. Strategi Indonesia Dalam Kerjasama IJEPA

Forum kerjasama Indonesia-Jepang *Economic Partnership Agreement* atau IJEPA ini memberikan peluang yang besar bagi Indonesia baik di bidang perdagangan maupun di bidang lain. Namun selain memberikan peluang, EPA dengan Jepang juga memberikan tantangan yang harus diperhatikan. Untuk meraih keuntungan dari peluang EPA dengan Jepang ini pemerintah harus menggunakan strategi yang terbaik. Strategi yang terbaik akan didapatkan dengan metode analisa yang baik juga. Metode yang baik untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan bagi Indonesia adalah dengan menggunakan metode SWOT analisis.

Sebagai negara sedang berkembang Indonesia terus berupaya menerapkan berbagai strategi melalui paket kebijakan politik luar negerinya. Kebijakan yang bersifat politis-ekonomis tersebut sifatnya sangat spesifik, yakni strategi yang diterapkan hanya berlaku untuk satu kerjasama, dan dengan satu negara. Misalnya, penerapan atau pelaksanaan strategi dalam kerjasama Indonesia-Jepang (IJEPA) akan berbeda dengan strategi yang dilaksanakan dalam kerjasama Indonesia-China (ACFTA). Hal tersebut dikarenakan potensi peluang dan tantangan dari masing-masing kerjasama yang sedang dan belum diikuti oleh Indonesia tersebut adalah berbeda. Meskipun demikian, berbagai penerapan strategi tersebut nantinya akan bermuara pada samudera kepentingan nasional, yakni kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk capaian kepentingan nasional yang besar dan mulia tersebut, sepertinya akan butuh waktu bertahun-tahun, dan hasil penelitian ini pun tidak akan mendorong percepatan ke arah itu. Dengan demikian, pembahasan ini akan lebih difokuskan pada strategi politik luar negeri Indonesia dalam menangkap peluang yang ditawarkan oleh forum kerjasama IJEPA, yang sebelumnya telah dianalisa pada bab III (tiga) dengan menggunakan metode analisa SWOT. Dari hasil analisis SWOT (matriks SWOT) Indonesia pada forum kerjasama IJEPA tersebut, dapat disederhanakan menjadi tiga alternatif strategi ke dalam, dan dua alternatif strategi keluar. Dimana masing-masing alternatif strategi tersebut mencakup *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Treats* (ancaman) atau SWOT Indonesia dalam menghadapi dan merebut peluang dari forum kerjasama IJEPA. Adapun strategi ke dalam yang dimaksud adalah :*Pertama*, Meningkatkan Daya Saing Pasar. *Kedua*, Menumbuhkembangkan Industri Dalam Negeri. *Ketiga*, Melakukan Pengamanan Perdagangan Barang dan Jasa. Sedangkan strategi ke luar yang dimaksud adalah, Kerjasama Alih Teknologi Dengan Jepang dan Kerjasama Pengiriman Tenaga Ahli.

1. Strategi Kedalam

a) Meningkatkan Daya Saing Pasar

Isu *Good Governence*, Daya Saing, dan Investasi Global sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia untuk menyelenggarakan pemulihan ekonomi nasional. Jika kita menyimak dengan teliti, kemerosotan ekonomi Indonesia dan masih belum berhasilnya

Indonesia dalam melakukan pemulihan ekonomi itu berkaitan dengan masalah pengaturan distribusi investasi global secara tepat guna.¹²¹ Pengelolaan investasi global secara tepat guna, berperan penting dalam hal meningkatkan daya saing suatu negara terutama Indonesia di lingkungan masyarakat internasional.

Untuk mendukung usaha tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) faktor pendukung bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing pasar. *Pertama*, meningkatkan kualitas mutu Sumber Daya Manusia (SDM). *Kedua*, meningkatkan kualitas produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Ketiga*, merevitalisasi peran dan fungsi pejabat publik. Ketiga faktor atau implementasi kebijakan tersebut, adalah generalisir dari analisis SWOT Indonesia dalam forum kerjasama IJEPA. Adapun penjelasan lebih lanjut dari ketiga faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut :

Faktor Pertama. Meningkatkan kualitas mutu SDM.

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki berbagai potensi yang dapat digunakan sebagai daya tawar untuk melakukan kerjasama internasional maupun sebagai daya saing untuk menciptakan citra positif di masyarakat internasional, salah satunya adalah sumber daya manusia yang banyak dan cenderung murah (karena mutu kualitasnya masih rendah). Sumber daya manusia yang banyak dan murah ini belum diimbangi dengan tingkat pendidikan

¹²¹<http://jurnalsospol.fisiopl.ugm.ac.id>. Terakhir diakses pada 4 Juli pukul 23.45 WIB.

serta profesionalisme yang tinggi. Sumber daya manusia Indonesia adalah sumber daya yang rendah, sehingga dalam skema Indonesia-Jepang *Economic Partnership Agreement* ataupun dalam kerjasama internasional lainnya, peningkatan mutu SDM menjadi perhatian penting dan serius bagi pemerintah Indonesia.

Untuk melihat gambaran dari daya saing Indonesia dalam menghadapi kompetisi yang semakin mengglobal dan kompetitif, baru-baru ini *World Economic Forum* (WEF) kembali mempublikasikan laporan tahunan mengenai daya saing global, yaitu *The Global Competitiveness Report 2011-2012*. Laporan ini disusun pada saat ekonomi dunia mengalami berbagai tantangan. Laporan tahun ini menghimpun data-data ekonomi dari 142 negara. Data-data ekonomi tersebut diolah untuk menghasilkan peringkat daya saing negara-negara. Daya saing didefinisikan sebagai kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu negara. Produktivitas yang tinggi mencerminkan daya saing yang tinggi, dan daya saing yang tinggi berpotensi memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan penduduk.¹²² Berikut laporan *The Global Competitiveness Report 2011-2012*.

Tabel. 10. Peringkat Daya Saing Beberapa Negara ASEAN Tahun 2011

NEGARA	PERINGKAT 2011	SKOR	PERINGKAT 2010	PERUBAHAN
Singapura	2	5.63	3	1
Malaysia	21	5.08	26	5
Thailand	39	4.52	38	-1
Indonesia	46	4.38	44	-2
Vietnam	65	4.24	59	-6
Filipina	75	4.08	85	10

Sumber: WEF (2011)

Berdasarkan data terbaru yang di *realese* WEF tersebut, ternyata peringkat daya saing Indonesia menurun, dari peringkat 44 pada tahun 2010 menjadi peringkat 46 pada tahun 2011, dibawah Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Peningkatan sumber daya manusia menjadi penting dan menyita perhatian serius pemerintah Indonesia, karena dalam forum kerjasama Indonesia-Jepang *Economic Partnership Agreement* atau IJEPA terdapat poin penting yakni, peluang kerjasama pada bidang jasa. Dalam bidang jasa ini, Jepang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerjanya ke Jepang, meski dengan penetapan standar kualitas yang tinggi.

Peluang yang ditawarkan IJEPA di bidang jasa tersebut, dan kaitannya dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga program

kerjasama, yaitu melalui program magang (lulusan SMK dan SMA), program kerja (lulusan Perguruan Tinggi), dan program profesional (Para Pejabat).

Program magang. Peningkatan kualitas mutu SDM Indonesia dalam skema IJEPA dilakukan dengan cara pembukaan magang bagi siswa/i Indonesia lulusan SMK dan SMA yang akan mengikuti program magang selama tiga tahun di Jepang. Program tersebut dilakukan atas kerjasama DEPNAKERTRANS (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dengan IMM (*Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises* atau Asosiasi untuk Pengembangan Tenaga Kerja Internasional Menengah dan Kecil) JAPAN / IMJAPAN.¹²³ Adapun tujuan dari program ini adalah pembinaan sumber daya manusia, serta pertukaran tenaga teknik, terampil dalam menghadapi internasionalisasi perusahaan kecil dan menengah dengan tujuan mengembangkan perusahaan kecil dan menengah Jepang serta ikut berperan dalam masyarakat internasional.

Dalam hal ini, peserta magang dari Indonesia akan mendapat hak yang sama dengan pekerja Jepang (UU Tenaga Kerja Jepang). Kesamaan hak itu mencakup gaji, jaminan perlindungan dan status sebagai tenaga kerja. Saat ini, jumlah peserta program magang dari

¹²³ <http://www.pemaganganjepang.com/info-magang-jepang/program-magang-jepang-imm-japan-2012/>. Terakhir diakses pada 6 Juli 2013 pukul 06.33 WIB.

Indonesia ke Jepang sebanyak 5,668 orang, yang sebagian besar ditempatkan di perusahaan manufaktur.¹²⁴

Program Kerja. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas mutu SDM-ya dilakukan juga melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang bertanggung jawab atas fasilitasi calon tenaga kerja Indonesia serta menjamin kelancaran proses tersebut.¹²⁵ Sampai saat ini kesempatan kerja (pekerja asing: Indonesia) yang disetujui oleh parlemen (DIET) Jepang dan pemerintah Jepang adalah sebagai *Kangoshi* atau perawat Medis dirumah sakit, dan *Kaigofukushishi* atau perawat pasien dipanti lansia. Adapun dalam skema kerjasama IJEPA, telah disepakati kuota pengiriman untuk 400 tenaga perawat Indonesia ke Jepang. Pada angkatan pertama bulan Agustus 2008, 104 perawat Indonesia telah diberangkatkan ke Jepang. Sedangkan pada Juni 2013 melalui BNP2TKI telah dikirim 156 orang perawat untuk bekerja di rumah sakit dan rumah peristirahatan lanjut usia di Jepang.

Program Profesional. Program Jepang untuk mengembangkan SDM Indonesia adalah dengan memberikan beasiswa pengembangan sumber daya manusia. Program ini dirancang guna meningkatkan

¹²⁴ <http://www.pemaganganjepang.com/info-magang-jepang/program-magang-jepang-imm-japan-2012/>. Terakhir diakses pada 6 Juli 2013 pukul 06.33 WIB.

¹²⁵ BNP2TKI adalah suatu instansi pemerintah Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk menempatkan TKI, salah satunya ke Jepang melalui program G TO G, bekerja sama dengan instansi pemerintah Jepang yang dikenal dengan Japan International Corporation Welfare Service (Jicwels).

kemampuan para pejabat, para pengusaha Indonesia yang menyusun dan mengimplementasikan berbagai kebijakan di berbagai bidang dalam rangka pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Untuk tujuan itu, setiap tahun sebanyak 30 orang pejabat pemerintah dan dosen universitas diterima di tingkat Master di Jepang dalam 6 (enam) bidang sebagai berikut : Administrasi Publik, Hukum, Ekonomi, Administrasi Bisnis, Hubungan Internasional dan Teknologi Informasi.¹²⁶

Selain upaya untuk meningkatkan mutu SDM melalui kerjasama pada tiga program tersebut (peningkatan SDM skala mikro), pemerintah juga seharusnya memberikan pendidikan gratis bagi semua warga negaranya (peningkatan SDM skala makro), yang bisa diwujudkan dengan cara privatisasi perusahaan tambang asing yang ada di Indonesia baik untuk pendanaan pendidikan gratis ataupun operasional penunjang lainnya. Hal ini bukan tidak mungkin untuk dilakukan, jika pemerintah mengubah proporsi keuntungan dari kerjasama dengan perusahaan tambang asing. Selama ini bagi hasil antara pemerintah dengan perusahaan asing sangat timpang (PT Freeport¹²⁷ : 1% untuk Indonesia dan 99% untuk Amerika, berlaku sampai dengan tahun 2041).

¹²⁶*Op Cit., Strategi Indonesia*,. Hlm. 77-78.

¹²⁷PT. Freeport Indonesia (PTFI atau Freeport) adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc. Perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah

Peningkatan mutu SDM pada skala makro melalui pendidikan gratis, tentu harus diikuti dengan menetapkan standar kompetensi pada setiap bidang profesi dan level kualifikasi. Dengan demikian, pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran di setiap jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan akan lebih mudah disusun dan lebih jelas arahnya. Hal ini akan mendorong penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan pasar kerja yang semakin kompetitif.

Faktor kedua, Meningkatkan kualitas produk UMKM

Produk-produk yang berkualitas dengan kemasan yang menarik dapat menjadi daya tarik untuk meningkatkan daya saing dengan produk-produk impor, khususnya produk-produk yang sejenis. Penciptaan branding atas produk-produk UMKM juga perlu dilakukan. Strategi peningkatan kualitas produk ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui penggunaan teknologi yang memadai, peningkatan keterampilan produksi, inovasi-inovasi pada desain produk dan sebagainya. Upaya peningkatan kualitas produk tentu juga harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, bantuan-bantuan teknis serta pendampingan misalnya dalam bidang teknologi juga sangat

1988} dan tambang Grasberg {sejak 1988}, di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

diperlukan agar penyerapan serta pemanfaatan teknologi pada UMKM dapat maksimal.

Selain itu, keberadaan Pusat Inovasi-inovasi Teknologi atau Pusat Inovasi UMKM perlu dioptimalkan perannya agar produk-produk yang dihasilkan lebih kreatif dan berkualitas. Pemerintah dapat mengembangkan pusat-pusat inovasi yang independen atau bekerjasama dengan perguruan tinggi sebagai pusat-pusat pengembangan inovasi. Dengan bantuan pusat-pusat inovasi desain ini tentunya akan membantu proses pengembangan produk yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM.

Pencanangan Tahun Indonesia Kreatif tahun 2009 sebenarnya bisa dijadikan sebagai momentum peningkatan kualitas produk-produk UMKM untuk dapat bersaing di pasar global. Empat belas sektor industri yang ditetapkan sebagai sektor ekonomi kreatif yakni *fashion*, kerajinan, pasar barang antik, film dan musik nasional, animasi, desain, arsitektur, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, riset dan pengembangan, perlu terus didorong pengembangannya.

Faktor ketiga, Merevitalisasi peran dan fungsi pejabat publik

Salah satu kekhawatiran ketidakmampuan produk Indonesia untuk

adalah harga-harga produk Indonesia yang mahal. Mahalnya harga-harga produk Indonesia ini disebabkan biaya produksi yang cukup tinggi yang diakibatkan iklim bisnis di dalam negeri yang belum kondusif seperti kondisi infrastruktur yang belum memadai, bunga perbankan yang masih tinggi, masih banyaknya pungutan liar dan sebagainya. Studi yang dilakukan oleh Perkumpulan Untuk Pengembangan Usaha Kecil Bandung di Kabupaten Purwakarta dan Bandung pada 2004-2005 (Heufers, Thamrin, dan Rachmi (ed), 2008: 116) menemukan berbagai persoalan yang menghambat pengembangan daya saing melalui produk UMKM. Hambatan tersebut terlihat pada aspek kelembagaan (perizinan usaha, peraturan daerah, retribusi), ketenagakerjaan, perekonomian daerah, sosial politik, partisipasi publik, keamanan, dan infrastruktur fisik).

Berbagai hambatan struktural dalam upaya meningkatkan daya saing tersebut, disebabkan oleh buruknya (budaya korup) peran dan fungsi dari masyarakat Indonesia dan pejabat publik terkait dalam mendukung realisasi iklim usaha yang kondusif. Hal tersebut, dipicu oleh gesekan kepentingan para oknum di dalam pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, revitalisasi peran dan fungsi pejabat publik menjadi salah satu agenda prioritas dalam meningkatkan daya saing di pasar global. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui kebijakan : *Pertama*, Memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab

maupun mengenai penggalan sumber dana dan pembiayaan pembangunan yang didukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang pendek, bersifat jejaring, bersifat fleksibel dan adaptif, diisi banyak jabatan fungsional, dan terdesentralisasi kewenangannya, sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efisien.

b) Memperkuat Struktur Industri Dalam Negeri

Kesepakatan EPA yang menjanjikan bantuan Jepang untuk mengembangkan industri manufaktur Indonesia juga memerlukan dukungan strategi dan kebijakan dari pemerintah Indonesia agar benar-benar memberikan manfaat besar. Program-program yang ditawarkan dalam IJEPA bukan program baru bagi hubungan kerjasama Indonesia dengan Jepang selama ini di sektor manufaktur. Namun, kerjasama tersebut tidak mampu membawa Indonesia menjadi negara industri yang kompetitif dan dapat memproduksi produk-produk yang dapat bersaing di pasar Global. Cukup banyak industri manufaktur yang dibangun dengan investasi langsung atau FDI Jepang sejak tahun 1980-an, tetapi hingga saat ini struktur industri manufaktur Indonesia tetap tidak memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal yang kuat. Struktur industri yang dangkal terjadi karena Indonesia tidak

membangun *supporting industry* (industri pendukung). Untuk Industri otomotif misalnya, Indonesia telah puluhan tahun membangun industri otomotif, tapi belum mampu memiliki industri otomotif seperti Malaysia yang mampu menghasilkan produk nasional andalan yang dihasilkan dari kerjasama dengan Jepang.¹²⁸

Sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Industri Nasional yang difokuskan kepada 32 sektor industri prioritas dan lebih fokus lagi untuk jangka panjang menjadi 3 sektor industri andalan yaitu ; industri agro, industri alat transportasi dan industri telematika/elektronika. Pemilihan produk dalam kajian ini fokus kepada industri alat transportasi, dalam hal ini dipilih Industri kendaraan bermotor, industri telematika/elektronika dalam hal ini dipilih industri elektronika termasuk industri peralatan rumah tangga dan industri alat berat. Pertimbangan lain dalam pemilihan produk ini adalah perlunya kajian lebih lanjut dalam implementasi perjanjian Indonesia-Jepang (IJEPA), dimana dalam salah satu elemen/sektor perjanjian yaitu "*Cooperation*" akan membentuk "*Manufacturing Industry Development Center*" (MIDEC). MIDEC ditujukan untuk pengembangan kapabilitas teknologi pembuatan produk-produk yang telah dipilih tersebut.

Sedangkan, dalam upaya meningkatkan kinerja ekspor atau industri nasional, pemerintah Indonesia menetapkan sektor-sektor atau industri-

¹²⁸ *Op Cit.,Memperdagangkan Kedaulatan*,.Hlm. 20.

industri unggulan, atau prioritas atau strategis, yang umum dikenal dengan sebutan strategi *picking the winners*. Misalnya, dalam visi Indonesia 2030, pemerintah menyiapkan 10 produk nonmigas unggulan Indonesia berdasarkan kriteria potensi ekspor, kandungan impor, dan sumber daya alam (SDA), seperti industri minyak goreng dan minyak kelapa sawit, industri bubuk cokelat, dan industri konsentrat makanan ternak, dan 10 produk nonmigas unggulan Indonesia berdasarkan kriteria potensi ekspor, kandungan impor, dan padat karya seperti industri alat pertanian, alat pertukangan, alat pemotong dan alat dapur lainnya, industri perabot rumah tangga, industri lampu dari logam, industri mesin pertanian dan perlengkapannya, dan industri mesin pengolahan.

Selain kebijakan Kementerian Perindustrian tersebut, upaya pendukung juga dilakukan oleh Departemen Perdagangan, antara lain : menurunkan ekonomi biaya tinggi, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing komoditi ekspor. Implementasinya dengan menyederhanakan prosedur perizinan, mengurangi hambatan distribusi (perda dan retribusi), transparansi kebijakan dan memfasilitasi infrastruktur perdagangan dalam negeri. Menperdag juga telah mengeluarkan sejumlah program prioritas tahun 2008, diantaranya pengembangan 10 produk utama, 10 produk potensial dan tiga jasa (10+10+3). Sepuluh produk utama meliputi udang, kopi, CPO, kakao, karet, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), alas kaki,

elektronika, komponen otomotif dan furniture, sedangkan 10 produk potensial mencakup kerajinan tangan, ikan dan produk ikan, tumbuhan obat, kulit dan produk kulit, makanan olahan, perhiasan, minyak atsiri, rempah-rempah, peralatan kantor bukan kertas, dan alat kesehatan. Sementara tiga jasa perdagangan terdiri dari konstruksi, teknologi informasi dan tenaga kerja. Kaitannya dengan jasa perdagangan yang terakhir, pelayanan kepada masyarakat memasuki babak baru yakni penerbitan Unit Pelayanan Perdagangan (UPP). Unit ini memberikan layanan perizinan secara elektronik sehingga secara berangsur-angsur akan menghilangkan kebiasaan bertemu antara pemohon dan pemroses izin. Ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan iklim bisnis dan usaha di Indonesia.

Pelayanan perizinan yang bersifat elektronik ini (*E-Licensing*) sudah menjadi keharusan bagi Indonesia agar lebih kompetitif di dunia bisnis khususnya di kawasan ASEAN. Selain itu, *E-Licensing* sendiri merupakan salah satu komitmen dalam penerapan *National Single Window* ditingkat nasional dan ASEAN. Oleh karena itu, setelah peluncuran UPP ini, Departemen Perdagangan akan segera menyiapkan landasan hukum yang akan memayungi kewenangan lembaga ini dalam segi legalitas penandatanganan perizinan tersebut.

Selain upaya Kementerian terkait, untuk mampu bertahan, berkembang dan terus meningkat serta mempunyai daya saing nilai

mempunyai manajemen strategi yang baik, salah satunya dapat dilakukan dengan cara mempelajari aspek politik dan hukum (dalam negeri) sebelum merambah ke pasar internasional. Memperkuat daya saing industri perlu diperhatikan pula dengan memperkuat posisi tawar eksportir, agar tercipta ruang untuk memperbaiki efisiensi produk nasional.

Pada gilirannya strategi, peran dan fungsi dari pemerintah Pusat dan Daerah harus berkesinambungan, untuk mendukung penguatan struktur industri sebagaimana yang diharapkan.

c) Pengamanan Perdagangan Barang

Peran standarisasi dalam meningkatkan kualitas produk di sektor industri dan jasa telah lama dikenal. Peningkatan kualitas barang adalah salah satu indikator yang menunjukkan gambaran daya saing barang terutamadalam rangka memasuki pasar ekspor. Kondisi ini menjadi suatu tuntutan yang tidak dapatdihindari oleh dunia usaha, melihat kenyataan kecenderungan masyarakat yang secara terus menerus menuntut suatu barang yang berkualitas dan bernilai ekonomis.¹²⁹

Keterkaitan perekonomian Indonesia terhadap perekonomian globalmenuntut pemerintah Indonesia agarmengikuti dan mematuhi standar-standar dan persyaratan dunia, khususnya di bidang mutu.

¹²⁹ http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buletin%202009/Full%2053.pdf. Terakhir diakses pada 4 Juli 2013 pukul 21.15 WIB.

Permasalahan mutu tidak lagi sekedar masalah pengendalian mutu atas barang dan jasa yang dihasilkan tetapi pengendalian mutu telah berorientasi kepada standar jaminan mutu yang pada akhirnya menuju pencapaian pengelolaan secara totalitas dari aktivitas pengendalian mutu (*total quality management*). Persyaratan dalam memenuh standar mutu barang bukanlah merupakan tuntutan Badan-badan Internasional di bidang sertifikasi atau akreditasi mutu tetapi lebih merupakan tuntutan pasar (*market driven*). Akibatnya apabila produk-produk yang diperdagangkan di pasar internasional tidak memenuhi tuntutan mutu yang dipersyaratkan maka produk-produk tersebut dapat mengalami hambatan (*barrier*) dalam memasuki pasar internasional.

Untuk meminimalisir hambatan kualitas mutu produk ekspor tersebut, pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam upaya peningkatan ekspor. Menyadari peran tersebut, upaya pengembangan standardisasi secara nasional sudah saatnya untuk dilaksanakan secara sungguh-sungguh, konsisten dan berkelanjutan. Kita sadari bahwa betapapun besarnya peningkatan produksi tetapi tanpa diimbangi dengan usaha peningkatan mutu yang sesuai dengan keinginan konsumen maka upaya tersebut akan sia-sia.

Memang ironis sekali bahwa, di satu sisi, disadari bahwa kualitas sangat penting untuk bisa unggul di pasar dunia, atau, misalnya, dalam hal IJEPA, agar produk-produk Indonesia bisa menembus pasar

... di sini. Indonesia sampai saat ini masih punya

masalah serius untuk memenuhi standar kualitas. Hingga Agustus 2007, pemerintah Indonesia telah menetapkan 3.200 standar nasional industri (SNI), tetapi baru 215 SNI produk yang diwajibkan. SNI yang diwajibkan itu pun sebagian besar masih berlaku sukarela karena baru 34 SNI produk yang dinotifikasi ke WTO. Tanpa notifikasi tersebut, tidak ada mekanisme pengawasan dan sanksi yang diterapkan.¹³⁰

Adapun notifikasi produk SNI (Standar Nasional Indonesia) ke WTO, adalah 5 produk industri yang meliputi produk tabung baja LPG, regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG, katup tabung baja LPG, kompor gas bahan bakar LPG dan selang karet kompor gas LPG, yang telah dianggap memiliki standar mutu. Kelima produk industri Indonesia yang di notifikasi tersebut, telah di uji. Parameter uji meliputi persyaratan mutu SNI 7368:2007, SNI 7369:2007, SNI 1591:2007, SNI 1452:2007, dan SNI 06-7213-2006.¹³¹

2. Strategi Keluar

a) Kerjasama Alih Teknologi

Kerjasama Alih teknologi dengan Jepang merupakan strategi yang akan meningkatkan kualitas mutu produk Indonesia sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri lainnya. Jepang memiliki standar kualitas produk yang sangat tinggi sehingga dengan kerjasama alih

¹³⁰ <http://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/10-arrah-kebijakan-ekonomi-indonesia-dalam-perdagangan-dan-investasi-riil.pdf>. Terakhir diakses pada 5 Juli 2013 pukul 01.24 WIB.

¹³¹ <http://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/10-arrah-kebijakan-ekonomi-indonesia-dalam-perdagangan-dan-investasi-riil.pdf>. Terakhir diakses pada 9 Juli 2013 pukul 02.50

teknologi produk-produk Indonesia diharapkan dapat masuk ke Jepang. Indonesia-Jepang *Economic Partnership Agreement* akan memberikan akses pasar yang sangat luas sehingga diperlukan produk yang bermutu tinggi untuk dapat merebut peluang.

Transfer teknologi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh negara terutama oleh negara berkembang dan kurang berkembang. TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau Hak Kekayaan Intelektual terkait Perdagangan) menyebutkan dalam pasal 7 UU bahwa salah satu tujuan dikaitkannya HaKi dan perdagangan adalah untuk meningkatkan transfer teknologi. Namun demikian, apabila dilihat dari hal yang paling mendasar dari perlindungan HaKi adalah untuk melindungi penggunaan teknologi dari pihak lain, maka tujuan meningkatkan transfer teknologi menjadi sulit dilaksanakan, apabila 97 persen pemegang hak paten dunia berasal dari negara maju. Sehingga apabila diadakan perlindungan HaKI maka negara maju dan perusahaan multinasionalnya yang akan mendapatkan keuntungan.¹³²

Disamping itu, dalam waktu dekat Indonesia tidak bisa meniru keberhasilan industri Jepang karena faktor sejarahnya yang berbeda. Perkembangan teknologi nasional pun tidak akan sanggup mengejar kemajuan teknologi Jepang. Meskipun demikian, upaya untuk memajukan industri nasional perlu dipacu dengan cara melakukan alih

¹³²Martoni, Syafran, Skripsi, *Politik Teknologi Di Dunia Ketiga : Perdagangan Teknologi Jepang Di Indonesia*, (UMY, 2006), Hlm. 30.

teknologi manufaktur melalui program magang di UKM-UKM Jepang untuk menyerap teknologi manufaktur dan melakukan inovasi teknologi manufaktur lokal dengan basis teknologi tepat guna.

Kajian ISTECS-Jepang mengenai kontribusi peserta magang atau *trainee* Indonesia di Jepang terhadap proses transfer teknologi dan perkembangan IPTEK nasional menyimpulkan bahwa program magang di Jepang lebih condong kepada peningkatan *skill* daripada alih teknologi. Hal ini sangat sesuai, karena program magang ini menjadi *cover* untuk pemenuhan tenaga kerja di UKM manufaktur yang perlu serapan tenaga kerja murah. Akan tetapi, ini masih bisa menjadi satu pintu alih teknologi karena penguasaan *skill* akan melahirkan inovasi teknologi manufaktur yang baru.

Alih teknologi tidak mudah dan murah. Kepemilikan teknologi yang harus dimiliki adalah teknologi manufaktur oleh UMKM nasional. Teknologi manufaktur ini akan menjadi teknologi tepat guna dan padat karya, sehingga dapat mendorong gerak pertumbuhan ekonomi riil di Indonesia. Teknologi manufaktur bisa didapatkan dengan penguasaan *skill*. Dengan penguasaan teknologi manufaktur membuka jalan bagi kebangkitan industri Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas produk ekspor Indonesia ke pasar Jepang.

b) Kerjasama Pengiriman Tenaga Ahli

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menperin Fahmi Idris memberikan sebuah alternatif strategi untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia dengan menekankan adanya kerjasama dan bantuan teknis berupa pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM Indonesia. Jepang merupakan negara yang maju dengan tenaga profesional yang banyak sehingga mereka dapat mengirimkan (sebagian) tenaga profesional mereka kepada pihak Indonesia untuk mengembangkan SDM dan industri dalam negeri. Selain itu, Jepang memperpanjang asistensi teknis di sektor dan keperluan yang penting. Asistensi teknis dari Jepang ini akan memerlukan pelatihan tenaga kerja dan keterampilan yang berfokus pada industri : manufaktur, agribisnis, perikanan, promosi ekspor dan usaha kecil menengah. Pelatihan-pelatihan ini akan memberikan pengetahuan bagi pelaku ekonomi di Indonesia sehingga akan dapat memperbaiki standar mutu produknya.

Pengiriman tenaga ahli atau profesional dari Jepang ke Indonesia berupa *technical assistance* diharapkan akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Pengirimna tenaga ahli dari Jepang harus dicermati, karena sebagai negara maju Jepang akan menggunakan pengiriman tenaga ahli ini sesuai dengan kepentingannya. Indonesia harus mempunyai standar bagi tenaga ahli yang akan dikirim dari Jepang.

terhadap negara berkembang. Namun di dalam forum kerjasama EPA Indonesia-Jepang ini, pengiriman tenaga ahli dari Jepang untuk meningkatkan mutu kualitas SDM Indonesia ini lebih terjamin. Hal ini dikarenakan forum kerjasama IJEPA mengikat kedua belah pihak untuk saling mematuhi peraturan yang telah disepakati. Pengiriman tenaga ahli melalui EPA ini akan memberikan banyak kemudahan bagi Indonesia. Kemudahan-kemudahan ini antara lain tenaga ahli yang dikirim dari Jepang mempunyai kualitas yang bagus karena adanya perjanjian ini sehingga ada standar yang harus dipenuhi, keringanan biaya untuk tenaga ahli, pemerintah Jepang akan menanggung semua biaya tenaga ahli yang di kirim ke Indonesia.

B. Strategi Indonesia Dalam Forum ACFTA

Pada kesimpulan awal bab, strategi Indonesia dalam forum kerjasama IJEPA dilakukan dengan dua jalan strategi, yakni strategi ke dalam dan strategi keluar. Pelaksanaan strategi tersebut tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk meningkatkan daya tawar dan daya saing Indonesia di pasar global, terlebih untuk mencapai kepentingan nasional lain yang bermuara pada kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam forum kerjasama ACFTA pun, alternatif strategi yang ditawarkan pada penelitian ini adalah strategi ke dalam dan strategi ke luar, meski secara teknisnya agak berbeda. Hal tersebut dikarenakan sering terjadi ketidakpastian dalam konstelasi ekonomi-politik global. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka

orientasi kebijakan politik luar negeri Indonesia harus berfokus pada membenahan diri (meningkatkan daya saing: normatif-implementatif) dan mengantisipasi perubahan-perubahan sistem internasional terutama dalam forum kerjasama perdagangan bebas ACFTA yang berpotensi untuk merperlemah daya tawar Indonesiadalam persaingan masyarakat internasional. Dengan demikian, strategi ke dalam pada forum kerjasama ACFTA, meliputi : Penguatan Pasar Domestik, Melakukan Pengamanan Produk Dalam Negeri, dan Mengubah Struktur Perekonomian. Adapun alternatif strategi keluar yang telah dianalis menggunakan metode SWOT Indonesia dengan China, meliputi dua hal, yakni Kerjasama Alih Teknologi dan Kerjasama di Bidang Pertahanan.

1. Strategi Kedalam

a) Menguatkan Pasar Domestik

Terdapat produk barang atau jasa dari suatu negara yang memiliki daya saing tinggi dalam suatu kawasan perdagangan. Namun terdapat pula barang dan jasa yang kalah bersaing dengan produk lain dalam suatu kawasan perdagangan bebas. Indonesia memiliki sejumlah barang yang memiliki keunggulan tinggi untuk bersaing di pasar kawasan atau pasar internasional. Namun terdapat pula produk yang memiliki daya saing lemah dan tidak dapat bersaing dengan produk kompetitor di pasar internasional. Kawasan perdagangan bebas China-Asean Free Trade Area telah memberi gambaran awal daya saing sejumlah produk Indonesia. Terdapat sejumlah produk yang memiliki

daya saing lemah, sehingga meminta adanya perhatian khusus dari pemerintah dan pelaku usaha.¹³³

Strategi pengembangan ekspor pada dasarnya ditunjukkan untuk menciptakan struktur ekspor yang kuat dan tangguh. Struktur ekspor yang kuat dan tangguh dapat dicapai bilamana produk tersebut telah benar-benar beragam jenisnya, pasarnya tersebar luas, dan pelakunya juga makin banyak. Untuk itu langkah yang diperlukan adalah diversifikasi, baik produk, pasar, maupun pelakunya. *Pertama*, Diversifikasi produk dapat dilakukan secara horisontal, dengan cara menggali berbagai jenis produk baru, dan secara vertikal dengan cara menciptakan produk baru dari bahan baku yang ada. *Kedua*, Strategi dalam diversifikasi pasar dilakukan dengan memperhatikan pengelompokan jenis produk yang akan dipasarkan dalam produk primer dan hasil industri pengolahan serta pasarnya, baik pasar tradisional maupun pasar baru. Selain itu, pengusaha harus sedikit demi sedikit memasuki sektor jasa yang juga merupakan area untuk meningkatkan nilai tambah, meraih keuntungan dan devisa, serta kesempatan kerja. *Ketiga*, Diversifikasi pelaku ekspor juga perlu ditingkatkan agar tidak hanya tergantung pada sekelompok kecil pengusaha tetapi melalui keseluruhan pelaku dunia usaha, baik swasta

¹³³ <http://www.stiami.ac.id/index.php/jurnal-transparansi-vol-iii-no-02-mei-2011/81-jurnal/111->

BUMN, maupun koperasi, baik yang besar, menengah maupun kecil. (pengelolaan investasi dan peminjaman luar negeri).

Selain itu, dalam upaya menguatkan pasar domestik dapat juga dilakukan dengan cara. *Pertama*, melakukan pembenahan infrastruktur dan energi termasuk sarana-prasarana, karena hal tersebut akan mengurangi biaya ekonomi tinggi dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri. *Kedua*, pemberian insentif (kebijakan fiskal) kepada sektor-sektor industri prioritas, karena dapat mengantisipasi perlambatan ekonomi global. *Ketiga*, membangun KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), selain dapat meningkatkan investasi asing langsung, juga dapat meminimalisir praktek perdagangan ilegal. *Keempat*, penyederhanaan peraturan (sinergisitas pemerintah Pusat dan Daerah) dan meningkatkan kapasitas kerja, sebagai pemulihan citra para birokrat Indonesia yang korup di lingkungan masyarakat internasional.

b) Melakukan Pengamanan Produk Dalam Negeri

Kemampuan menghadapi tantangan dalam globalisasi ekonomi, ditentukan atau berkaitan erat dengan kemampuan suatu negara terutama Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi, yaitu dengan memahami tantangan, kecenderungan dan pedoman untuk menangkap peluang dalam globalisasi ekonomi.¹³⁴ Sejalan dengan kecenderungan globalisasi ekonomi melalui sistem perdagangan bebas

seakan-akan telah membuat kedaulatan suatu negara tidak lebih sakral daripada modal, dan tidak sedikit negara berkembang termasuk Indonesia yang terjebak dalam posisi menggadaikan kedaulatan kepada regim pasar.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus segera merespon akumulasi dampak dari absennya strategi pada posisi tersebut, yaitu melalui paket kebijakan politik luar negeri yang komprehensif dan tepat sasaran, itu pun jika pemerintah Indonesia tidak bermaksud untuk benar-benar menggadaikan kedaulatan (ketergantungan yang tinggi pada negara lain/maju) atau bahkan menjualnya kepada penguasa regim pasar (umumnya negara-negara maju). Pilihan strategi yang diimplementasikan ke dalam pelaksanaan politik luar negeri pada posisi tersebut, salah satunya adalah melakukan pengamanan produk dalam negeri, sekurang-kurangnya melalui dua cara :*Pertama*, merevitalisasi program ACI (Aku Cinta Indonesia). *Kedua*, menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif.

Pertama. Merevitalisasi Program ACI. Salah satu permasalahan yang dialami oleh Indonesia dalam perdagangan internasional adalah praktik dumping (penjualan barang impor di bawah harga normal produk domestik). Hal ini terjadi karena membanjinya produk-produk impor dengan harga penjualan yang jauh lebih murah dari harga barang dalam negeri, sehingga akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing yang pada akhirnya akan mematikan pasar barang

sejenis dalam negeri, dan selanjutnya akan muncul dampak turunannya seperti pemutusan hubungan kerja, terjadinya pengangguran serta bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri.¹³⁵ Hasil survei Kementerian Perindustrian terhadap setahun pelaksanaan ACFTA menemukan praktek dumping puluhan produk impor China. Berdasarkan hasil survei terdapat 190 barang impor China, sebanyak 38 produk harga jualnya di Indonesia lebih murah dibanding harga jual di pasar domestic mereka.¹³⁶

Dengan demikian, selain melakukan kebijakan anti dumping pada skala nasional maupun internasional, pemerintah Indonesia juga perlu meyakinkan konsumen atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahwa betapa penting dan berkualitasnya produk-produk dalam negeri atau dengan kata lain slogan "*Aku Cinta, Aku Bangga dan Aku Pakai Produk Dalam Negeri*" dalam program ACI perlu diimbangi juga dengan peningkatan kualitas produk pada sektor-sektor industri yang ada, sehingga kecurigaan praktik dumping tersebut dapat teratasi.

Revitalisasi program ACI merupakan salah satu alternatif untuk membangkitkan perekonomian bangsa. Sekurang-kurangnya ada empat indikator dalam mendorong Revitalisasi program ACI. *Pertama*, diperlukan pemimpin yang mampu mendorong produksi

¹³⁵ <http://unram.ac.id/regulasi-anti-dumping-sebagai-upaya-perlindungan-terhadap-industri-dalam-negeri/>. Terakhir diakses pada 9 Juli 2013 pukul 01.20 WIB

¹³⁶ <http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-ajukan-keberatan-terhadap-china-terkait->

nasional berbasis kekuatan lokal. *Kedua*, diperlukan keberpihakan pada eksportir penghasil devisa negara. *Ketiga*, diperlukan program pengurangan jumlah impor komponen yang dapat diproduksi atau dihasilkan di Indonesia. *Keempat*, revitalisasi program ACI melalui strategi promosi intensif dengan menggunakan selebriti (pejabat publik) sebagai endorser produk. Misal, Presiden SBY menggunakan sepatu buatan Cibaduyut. Mari Elka Pangestu memakai pakaian batik buatan Pasar Bering Hardjo. Miss Indonesia menggunakan kosmetik Sari Ayu. Terakhir, memberikan penghargaan pada produsen yang memproduksi barang menggunakan komponen lokal dan tenaga kerja lokal. Seperti, penghargaan Upakarti, Indonesia *Entrepreneur of the Year*, dll.

Kedua. Menciptakan Perdagangan Sehat dan Iklim Usaha Kondusif. Menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, perlu dilakukan secara serius (dukungan berbagai pihak) dan berkelanjutan oleh pemerintah Indonesia, mengingat daya tawar dan daya saing Indonesia yang lemah dan semakin kompetitifnya persaingan di pasar global. Untuk menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif tersebut, secara normatif-implementatif terdapat dua faktor pendukung. *Pertama*, efektifitas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia

Impor Produk Tertentu Untuk (PTU). Selanjutnya dukungan dari masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan dan profesi atau dengan kata lain jalinan kordinasi antara pemerintah Pusat dan Daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mewujudkan perdagangan yang sehat dan iklim usha yang kondusif.

Pertama, efektifitas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam satu dekade ini, produk-produk China telah menjangkau dan merambah banyak negara, termasuk Indonesia. Di tanah air, produk-produk dari “sang naga” ini terus saja meningkat dengan tajam mulai dari barang modal (mesin produksi), elektronik, perkakas rumah tangga, makanan/minuman, mainan anak, kain dan garmen, obat-obatan, buah dan sayuran, sepatu/alas kaki, dan masih banyak lainnya. Produk-produk ini dijual dengan tingkat harga lebih murah baik dibandingkan dengan produk impor lain maupun produk lokal. Atas dasar kekhawatiran tersebut dan masih dalam semangat untuk meningkatkan daya tawar dan daya saing di pasar global, pada tahun 2007 Kemendag mengeluarkan Peraturan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pemerintah akan menjadikan Standar Nasional Indonesia (SNI) ini sebagai salah satu senjata untuk mencegah membanjirnya barang

impor dari Cina setelah diterapkannya perdagangan bebas ACFTA. SNI ini dipandang mampu menjaga kualitas barang yang masuk. Deputi Menko Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Edy Putra Irawadi, berpendapat penerapan SNI membuat kualitas barang yang masuk ke dalam negeri akan terjaga. Barang makanan atau minuman yang sudah kedaluarsa tiga bulan tidak boleh lagi melintas perbatasan. Namun, realisasi penerapan SNI bukanlah hal yang sederhana, karena memprasyaratkan komitmen dan kesanggupan pelaku industri. Jika hal tersebut gagal dipenuhi, produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan baik di dalam negeri maupun internasional. Selain itu, juga harus tersedia infrastruktur penunjang untuk penerapan SNI seperti lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium uji yang terakreditasi.

Kedua, efektifitas Permendag No. 56/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Pada akhir tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan kebijakan impor produk tertentu, melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor: 56/M DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Salah satu implementasi dari strategi pengamanan pasar dalam negeri adalah dengan mengeluarkan kebijakan impor produk tertentu melalui Permendag No. 56/M DAG/PER/12/2008. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem *tracking* yang jelas sehingga Pemerintah dapat *memonitoring* importasi produk tertentu, serta mengambil langkah-langkah apabila

terdapat dugaan terjadinya perdagangan yang kurang sehat dan tidak kondusif. Setiap impor produk tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut: Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Makassar, Dumai (khusus makanan-minuman) serta pelabuhan udara internasional. Impor produk tertentu tersebut harus dilakukan verifikasi dan penelusuran teknis impor oleh Surveyor di negara tempat pelabuhan muat sebelum dikapalkan.¹³⁷

Meskipun kebijakan impor produk tertentu dapat memonitor importir produk tertentu, namun hal tersebut belum dapat mewujudkan *tracking system* importasinya. Sampai dengan tanggal 12 April 2010, total permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT) Produk Tertentu berjumlah 4.931 buah. Dari jumlah permohonan tersebut, 81,8%-nya atau sebanyak 4.032 permohonan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk ditetapkan sebagai IT-Produk Tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 11. Rekapitulasi IT-Produk Tertentu, s.d. 12 April 2010

No.	Jenis Produk	Jumlah Permohonan	Jumlah IT	
			Perusahaan	%
1	Alas Kaki	562	487	86.7
2	Elektronika	2,200	1,749	79.5
3	Mainan Anak-Anak	661	610	92.3
4	Pakaian Jadi	740	613	82.8
5	Makanan dan Minuman	768	573	74.6
Total		4,931	4,032	81.8

Sumber: Dir. Impor (diolah)

¹³⁷<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/04/26/-1366943563.pdf>. Terakhir diakses pada 8 Juli 2013 pukul 14. 52 WIB.

Dari jumlah IT-Produk Tertentu yang sudah diterbitkan tersebut, apabila dilihat dari rasio jumlah IT terhadap jumlah barang sesuai HS-10 digit, maka beberapa produk memiliki jumlah importir relatif banyak, yaitu: Alas kaki, Elektronika dan Mainan anak. Sementara itu, produk makanan minuman dan pakaian jadi jumlah importirnya relatif sedikit.

Sejalan dengan rasio jumlah IT tersebut, sedikitnya 41 pos tarif dari produk jamu, kosmetik, dan elektronik dipastikan masuk dalam cakupan produk tertentu yang diatur mekanisme impornya. Ke-41 pos tarif itu terdiri dari tujuh pos tarif untuk produk jamu, 33 pos tarif produk kosmetik, dan satu pos tarif produk elektronik. Penambahan dua produk baru tersebut menambah jumlah produk tertentu yang diatur impornya dari semula hanya lima produk menjadi tujuh produk dan sekaligus menambah cakupan pos tarif dari 504 menjadi 545 pos tarif.

Dengan demikian, kedua faktor tersebut diharapkan dapat diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia (baik elite politik maupun elite masyarakat luas) secara efektif dan berkelanjutan, untuk menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, selain sebagai upaya meningkatkan daya tawar dan daya saing di pasar global terutama dalam menghadapi pengaruh dari China dalam skema

c) Mengubah Struktur Ekonomi

Hampir seluruh negara yang melakukan perdagangan bebas, mempunyai tujuan yaitu untuk melindungi konsumen dan industri dalam negeri dari persaingan global dengan memberlakukan beberapa kebijakan. Kebijakan mengubah struktur perekonomian, dengan cara reorientasi kebijakan ekspor produk primer (bahan mentah dan sumber energi) kepada produk turunannya perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mendapatkan keuntungan lebih daripada hanya sekedar mengeksploitasi sumber daya alamnya sendiri melalui jalur ekspor, yang pada gilirannya akan memperlemah struktur industri dalam negeri karena bahan baku untuk operasionalnya di ekspor oleh pemerintah.

Padahal, kekuatan struktur industri tergantung pada kokohnya hubungan kerja (*networking*) antara industri dasar dengan hilirnya, termasuk *supporting industry*-nya seperti industri kecil dan menengah (IKM). IKM seakan tumbuh "*by accident not by design*" sehingga kurang mampu menjadi *supporting industry* bagi industri yang lebih besarnya. Padahal jumlah IKM lebih dari 90% dari total industri. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM terlihat bahwa sekitar 80% lebih SDA diekspor dalam kondisi bahan alam tanpa pengolahan yang berarti. Artinya produk tambang (produk primer)

yang diekspor tidak memiliki nilai tambah, terutama bagi masyarakat.¹³⁸

Dalam upaya, meminimalisir akumulasi dampak dari kebijakan ekspor produk primer tersebut dan untuk mempercepat proses industrialisasi, Menperin menambahkan, salah satu fokus program Kemenperin, seperti Hilirisasi Industri Berbasis Agro, Migas dan Bahan Tambang Mineral. Hilirisasi industri di dalam negeri akan mampu menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha di dalam negeri.¹³⁹

Sebagai gambaran, pada tahun 2010 produksi minyak sawit mentah (CPO & CPKO) mencapai 23,5 juta ton dan lebih dari 46% langsung diekspor, produksi kakao 559 ribu ton dan 77,4% diekspor dalam bentuk bijih, serta karet alam 2,8 juta ton dimana 81,9% diekspor dalam bentuk *Crumb Rubber*. Begitu pula ekspor bahan mineral mengalami peningkatan tajam sejak 2008 hingga 2011. Ekspor bauksit meningkat 500%, ekspor Nikel meningkat 750%, ekspor Bijih Besi meningkat 750%, dan ekspor Tembaga meningkat 800%. Namun jika dilakukan hilirisasi industri, maka akan meningkatkan nilai tambah yaitu pada pengolahan bijih bauksit hingga menjadi aluminium 148

¹³⁸ http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/jurnal_internasional.pdf. Terakhir diakses pada 10 Juli pukul 00.05 WIB.

¹³⁹ <http://kemenperin.go.id/artikel/6540/Kebijakan--Nasional-Industri-Mengutamakan-Kepentingan-Nasional>. Terakhir diakses pada 9 Juli 2013 pukul 23.41 WIB.

kali lipat, bijih nikel menjadi *stainless steel* 105 kali lipat, pengolahan bijih besi menjadi *slab/billet* 12 kali lipat, pengolahan bijih tembaga menjadi Ingot 100 kali lipat, pengolahan CPO menjadi *surfactant* dan pengolahan CPKO menjadi *base cosmetic* 4,6 kali lipat. Pada gilirannya pengendalian ekspor produk primer melalui produk turunannya, akan menguatkan struktur industri dalam negeri sehingga siap terhadap gempuran produk-produk luar negeri yang diliberalisasi melalui kesepakatan perdagangan bebas.

2. Strategi Keluar

a) Kerjasama Transfer Teknologi

Di tengah memanasnya situasi di laut China Selatan, China justru ingin membuktikan diri bahwa mereka adalah saudara tua Indonesia. China tidak main-main terhadap janji mereka tentang transfer teknologi, salah satunya adalah peluru kendali untuk Indonesia. Dalam kunjungannya ke Kementerian Pertahanan, tim China yang dipimpin oleh Liu Yunfeng, Deputy Direktur Umum Sains, Teknologi dan Industri Pertahanan China (SASTIND), sepakat melakukan transfer teknologi peluru kendali C-705 secara bertahap.

Tahap pertama adalah "Semi *Knock Down*", Indonesia merakit sedikit/sebagian dari rudal C-705 dan sisanya dikirim langsung dari China. *Tahap Kedua: Complete Knock Down*. China mengirim semua komponen rudal secara terurai untuk dirakit Indonesia sepenuhnya.

Adapun tahap *ketiga* adalah *riset and development*. Di tahapan ini Indonesia boleh memodifikasi peluru kendali sesuai dengan kebutuhan TNI. Apabila Indonesia berhasil menguasai *guide missile* melalui rudal C-705 ini, maka kerjasama ini akan menjadi sebuah loncatan besar bagi teknologi militer Indonesia. Kerjasama itu akan mengantarkan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dalam produksi senjata. Saat ini Indonesia telah mempersiapkan satu daerah produksi situs rudal yang menghadap laut terbuka untuk percobaan pembuatan rudal C-705 yang memiliki jangkauan 120 kilometer.¹⁴⁰

b) Kerjasama Di Bidang Pertahanan

Indonesia dan Republik Rakyat China sepakat memperluas kerjasama pertahanan untuk meningkatkan profesionalisme angkatan bersenjata (darat, laut, dan udara) kedua negara, hubungan lebih baik kedua pihak serta guna mendukung stabilitas keamanan khususnya di Asia. Forum ke V (lima) Konsultasi Pertahanan Indonesia-China, yang diselenggarakan pada Kamis 10 Januari 2013 di Beijing, telah berhasil mendorong kedua negara untuk melakukan perluasan kerjasama pertahanan angkatan bersenjata kedua negara. Hal tersebut dilakukan melalui : pendidikan perwira, latihan bersama Angkatan Laut (*navy to navy talk* program keamanan maritim), latihan bersama pasukan khusus kedua negara, pelatihan pilot pesawat tempur Sukhoi TNI-

¹⁴⁰ <http://strategi-militer.blogspot.com/2012/08/motif-dibalik-janji-transfer-teknologi.html>. Terakhir diakses pada 6 Juli 2013 pukul 17.50 WIB.

Angkatan Udara, kerja sama industri pertahanan dan pembelian sejumlah alat utama sistem senjata.¹⁴¹

Dalam forum konsultasi pertahanan Indonesia-China, Indonesia mendelegasikan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, sedangkan delegasi China dipimpin Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata China Letnan Jendral Qi Jian Guo. Adapun perkembangan kerjasama pertahanan kedua negara, sekurang-kurangnya dapat diketahui dari dua kerjasama, yaitu di bidang pendidikan dan pertukaran perwira dan bidang latihan bersama angkatan bersenjata kedua negara. Dalam perluasan kerjasama bidang pendidikan dan pertukaran perwira misalnya, sejak 1967 sudah 107 personel militer Indonesia yang belajar di China. Saat ini tercatat 12 orang perwira militer Indonesia yang belajar di China, demikian dikutip dari dokumen itu. Sedangkan China hingga kini telah mengirimkan delapan orang perwira militernya.

Selain itu, untuk latihan bersama, Indonesia dan China telah dua kali menggelar latihan bersama antara Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat dengan Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata China (*People's Liberation Army/PLA*) dengan sandi "*Sharp Knife*". Kerja sama antarpasukan khusus dalam penanggulangan terorisme, akan terus ditingkatkan dan diperluas. Kedepan mungkin dapat dilakukan

¹⁴¹ <http://www.antaraneews.com/berita/352496/indonesia-china-perluas-kerja-sama-pertahanan>. Terakhir diakses pada 10 Juli 2013 pukul 16.19 WIB.

latihan bersama untuk menghadapi ancaman non tradisional seperti penanggulangan bencana alam, demikian sperti dikutip dalam dokumen itu.